

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pembangunan jalan tol sudah menjadi prioritas pembangunan infrastruktur wilayah sejak beberapa dekade terakhir (Suparwan et al., 2024). Pembangunan tol diposisikan sebagai komponen utama yang dapat membawa manfaat bagi suatu wilayah, karena dapat mendukung konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Tetapi, infrastruktur yang memadai tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung aktivitas perekonomian saja, infrastruktur jalan tol juga dianggap sebagai elemen strategis dalam memperkuat keterhubungan antarwilayah dan membangun daya saing kawasan (Santosa et al., 2023).

Pembangunan infrastruktur yang terencana dan berkualitas diyakini mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai fasilitas, baik di bidang ekonomi, pendidikan, ataupun kesehatan (Gultom & Tini, 2020). Oleh karena itu, pembangunan jalan tol tidak hanya menjadi proyek fisik semata, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Sejumlah proyek jalan tol di Jawa Barat telah menunjukkan peran pentingnya dalam mempercepat pembangunan wilayah, seperti Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan), Tol Soreang-Pasirkoja, Tol Purbaleunyi dan Tol Cipularang. Keberhasilan proyek-proyek tersebut memberikan dorongan kuat bagi pemerintah untuk terus memperluas jaringan jalan tol ke wilayah yang belum sepenuhnya terintegrasi (Nouri et al., 2024).

Kini, terdapat salah satu proyek ambisius pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa Barat hingga Jawa Tengah, yaitu pembangunan jalan Tol Getaci (Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam artikel *Antara Megapolitan* (2023) menyampaikan bahwa proses awal pembangunan tol di kawasan tersebut tengah berlangsung, mengingat area di wilayah ini memiliki

banyak pusat pertumbuhan, tapi belum didukung oleh konektivitas yang memadai.

Pembangunan jalan Tol Getaci dirancang untuk menghubungkan antara dua provinsi di Pulau Jawa, yakni Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Panjang jalan yang mencapai 206,65 kilometer, dengan porsi 171,4 kilometer di Jawa Barat, dan 35,25 kilometer di Jawa Tengah (KPBU, 2022). Dengan lintasan sepanjang itu, Tol Getaci menjadi salah satu jalan tol terpanjang di Indonesia, sehingga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap sektor agrikultur, industri dan pariwisata.

Proyek ini akan diimplementasikan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan menerapkan kategori *solicited*, yaitu pembangunan yang diinisiasi oleh pemerintah dan kemudian ditawarkan kepada badan usaha untuk dilaksanakan (KPBU, 2022). Maka, dalam skema ini, pemerintah bertindak sebagai inisiator utama pembangunan, dengan mengidentifikasi terkait kebutuhan serta potensi dalam pembangunan, yang kemudian gagasan tersebut ditawarkan kepada pihak swasta untuk menjadi pelaksana proyek tersebut (Setiajatnika et al., 2023). Penerapan skema ini memungkinkan adanya kolaborasi antara sektor publik dengan pihak swasta sehingga proyek dapat dikerjakan lebih cepat dengan pembagian tanggung jawab yang jelas.

Namun, pada praktiknya, proyek-proyek infrastruktur berskala besar seperti ini kerap menghadapi tantangan sosial yang kompleks, terutama dalam hal pemerataan manfaat. Meskipun tujuan utamanya adalah memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, kenyataannya masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak sering kali justru mengalami ketidakpastian, kehilangan hak atas tanah, dan minimnya ruang keterlibatan. Sehingga kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin besar skala pembangunan, maka semakin besar pula potensi ketimpangan dalam pemberian manfaat (Butarbutar & Rahayu, 2023).

Oleh karena itu, setiap proyek pembangunan infrastruktur, termasuk Tol Getaci, perlu memastikan adanya penyebaran informasi yang transparan,

melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan, dan pemberian kompensasi yang adil sesuai dengan keputusan bersama. Dalam konteks pemberian kompensasi yang adil, adanya penyebaran informasi yang merata dan partisipasi dari masyarakat dapat menjamin bahwa masyarakat terdampak tidak menjadi korban pembangunan, melainkan menjadi bagian dari proses pembangunan (Siahay et al., 2023).

Secara geografis, pembangunan Tol Getaci telah menetapkan beberapa wilayah strategis di wilayah Kabupaten Bandung sebagai jalur pembangunan, yang salah satunya adalah Desa Ciluluk. Desa yang letaknya di Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung ini akan menjadi salah satu dari enam desa di Kecamatan Cikancung yang wilayahnya akan terdampak pembangunan Tol Getaci. Berdasarkan dokumen desa yang didapat, area yang terdampak oleh pembangunan tol di Desa Ciluluk ini mencakup Kampung Pangadungan RT.001, RW 005 hingga Kampung Gorowek khususnya pada Perumahan Sagitarius RT.004, RW. 008, sehingga terdapat 149 kepala keluarga yang akan terdampak secara fisik akibat pembangunan tersebut. Sedangkan untuk luas lahan yang terdampak langsung oleh proyek diperkirakan mencapai 26 hektar (Sholeh, 2024).

Masyarakat Desa Ciluluk sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, buruh pabrik, serta pengrajin lokal seperti pembuat keset kaki. Karakteristik sosial ekonomi ini memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Ciluluk sangat bergantung pada ruang hidup dan lahan sebagai sumber penghidupan. Oleh karena itu, dengan adanya pembangunan Tol Getaci di Desa Ciluluk ini berpotensi mengakibatkan terjadinya ketegangan antara potensi pertumbuhan perekonomian dengan risiko sosial yang dihadapi oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang terdampak secara langsung (Tyagita et al., 2024). Maka, pembangunan ini harus memperhatikan kebijakan terutama dalam hal kompensasi dalam pembangunan, karena hal ini sangat menentukan bagaimana kualitas hidup masyarakat terdampak dapat tetap dipertahankan.

Secara konseptual pembangunan Tol Getaci bertujuan untuk meningkatkan efisiensi konektivitas antarwilayah, serta memberikan manfaat secara nyata bagi

masyarakat Desa Ciluluk yang terdampak langsung (Urrahmi & Putri, 2020). Namun, praktiknya sejauh ini pembangunan Tol Getaci sudah menghadapi hambatan yang signifikan. Berdasarkan laporan *Pikiran Rakyat Garut* (2024), pembangunan Tol Getaci mengalami penundaan karena terdapat beberapa faktor termasuk kegagalan dua konsorium senilai Rp. 37 triliun dalam proses lelang serta adanya konflik kepentingan dari badan usaha jalan tol (BUJT) sebelumnya.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa perencanaan teknis yang matang saja tidak cukup. Tanpa adanya manajemen sosial yang adil dan transparan, pembangunan berisiko menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat terdampak. Dalam konteks pembangunan Tol Getaci di Desa Ciluluk, muncul persoalan-persoalan seperti minimnya informasi yang diterima masyarakat, tidaknya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah, serta ketidakjelasan mengenai bentuk dan nilai kompensasi menjadi isu yang mencuat di tahap pra-pembangunan.

Situasi ini kemudian memunculkan ketidakpastian di kalangan masyarakat terkait keberlanjutan proyek dan hak-hak yang seharusnya mereka terima. Padahal, rencana pembangunan Tol Getaci di Desa Ciluluk ini sudah dikabarkan sejak tahun 2019, tetapi hingga pertengahan tahun 2024, masyarakat belum mendapatkan kepastian yang jelas mengenai pelaksanaan dan alokasi dana dalam proyek pembangunan Tol Getaci (Sholeh, 2024). Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan komunikasi dan relasi kekuasaan antara pihak pelaksana proyek dengan masyarakat terdampak.

Sebagai tanggapan atas berbagai hambatan tersebut, pemerintah akhirnya memutuskan bahwa pembangunan Tol Getaci sementara ini akan dipangkas hingga Ciamis (Anisa, 2024). Langkah ini diambil untuk mempercepat realisasi proyek selama menunggu kepastian dari investor baru yang bersedia melanjutkan pembangunan ke tahap selanjutnya. Dan jika proyek ini telah mendapatkan investor baru, maka diharapkan proyek ini dapat berlanjut sesuai dengan rencana awal pembangunan, karena tertundanya pembangunan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat terdampak.

Meskipun proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan pembangunan wilayah, namun jika proses kompensasi di tahap pra-pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan prinsip keadilan, maka proyek ini justru akan menambah beban sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Hal ini mendorong peneliti bahwa perlunya kajian kritis yang mendalam untuk menganalisis bagaimana kompensasi dilaksanakan dan sejauh mana prinsip keadilan benar-benar diterapkan dalam praktik di lapangan.

Pemilihan topik pada penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya perhatian terhadap aspek sosial dalam tahap pra-pembangunan, khususnya pada wilayah pedesaan seperti Desa Ciluluk. Padahal penting bagi pemerintah dan pihak pelaksana proyek untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi, terutama dalam hal kompensasi yang adil, transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat (Ramadhan, 2017).

Penelitian ini secara khusus fokus pada beberapa aspek penting dalam pelaksanaan kompensasi, yaitu penyebaran informasi kepada masyarakat, sejauh mana masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan, serta kesesuaian kompensasi yang diberikan. Ketiga aspek ini dinilai sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan kompensasi pada tahap pra-pembangunan sudah memenuhi unsur keadilan sosial.

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa keseluruhan proses ini dilakukan secara transparan, sehingga masyarakat merasa dihargai dan hak-hak mereka tidak ada yang diabaikan. Melalui komunikasi yang terbuka dan pelibatan masyarakat secara aktif, proses pra-pembangunan dapat berlangsung lebih lancar dan diterima secara sosial oleh seluruh pihak yang terlibat.

Berdasarkan pengamatan awal, dugaan sementara dalam penelitian ini adalah bahwa kurangnya transparansi dalam penyebaran informasi, serta ketidakjelasan mengenai mekanisme kompensasi menjadi faktor utama yang memicu kecemasan di kalangan masyarakat terdampak. Hal ini diperburuk dengan pernyataan bahwa masyarakat Ciluluk sudah dua tahun menunggu tanpa kepastian mengenai proses pra-pembangunan, sehingga mengakibatkan ketidakpastian dan juga kekhawatiran (Anisa, 2024). Dalam hal ini, masyarakat

membutuhkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai hak-hak mereka dalam proyek pembangunan berskala besar seperti Tol Getaci.

Untuk menganalisis fenomena tersebut, maka penelitian ini menggunakan kerangka teoritis keadilan dari John Rawls. Teori ini menekankan dua prinsip utama, yaitu prinsip kebebasan dasar bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan dasar yang sama, dan prinsip perbedaan yang menjelaskan bahwa keteimpangan sosial atau ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberi keuntungan bagi kelompok yang paling rentan. Dalam konteks pembangunan, teori ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan kompensasi telah memenuhi prinsip keadilan, baik dari sisi prosedural seperti informasi dan partisipasi, maupun dari sisi substansi seperti nilai dan bentuk kompensasi.

Dengan menggunakan teori keadilan dari Rawls, penelitian ini akan menilai apakah pemberian kompensasi dalam tahap pra-pembangunan Tol Getaci telah berpihak kepada masyarakat terdampak, terutama kelompok rentan yang berisiko kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan seperti keadilan yang dimaksud oleh Rawls (Prahassacitta, 2018).

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Paula Suwaty, (2016) dalam skripsinya yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap Proaktif Masyarakat dalam Pelepasan Hak atas Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sikap masyarakat dalam proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka dilibatkan, diberi informasi, dan mendapatkan perlakuan yang adil. Sehingga penelitian ini dapat menjadi rujukan penting untuk melihat bagaimana praktik kompensasi memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap proyek pembangunan.

Ketertarikan peneliti untuk memilih fenomena ini sebagai sebuah penelitian adalah muncul dari kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana proses pelaksanaan kompensasi dilakukan sebelum tahap pembangunan tol dimulai. Selain itu, alasan lain dari pemilihan fenomena ini ialah karena masih minim penelitian yang membahas terkait manfaat pembangunan tol bagi

masyarakat terdampak pada tahap pra-pembangunan khususnya di masyarakat pedesaan.

Hasil observasi awal di Kampung Pangadungan RW 005 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mendapatkan kejelasan mengenai pelaksanaan kompensasi yang akan mereka terima. Informasi yang beredar masih bersifat terbatas dan tidak merata, bahkan beberapa masyarakat menyatakan bahwa mereka hanya mengetahui rencana pembangunan dari obrolan tetangga. Dan masyarakat juga menyampaikan bahwa hingga pertengahan tahun 2024, belum ada informasi yang menyeluruh maupun pemberitahuan resmi mengenai nilai kompensasi.

Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pelaksanaan pembangunan Tol Getaci dalam pelaksanaan kompensasi dilakukan pada tahap pra-pembangunan, serta menganalisis proses tersebut dalam mencerminkan keadilan sosial bagi masyarakat terdampak. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menarik fenomena ini kedalam judul **“KEADILAN DALAM PELAKSANAAN KOMPENSASI PRA-PEMBANGUNAN TOL GETACI DI DESA CILULUK KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG” (Studi Kasus Pada Kampung Pangadungan Rukun Warga 005).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah menjadi berikut:

1. Bagaimana penyampaian informasi mengenai kompensasi pra-pembangunan Tol Getaci yang dilakukan di Kampung Pangadungan RW 005?
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat Kampung Pangadungan RW 005 dalam pengambilan keputusan terkait kompensasi yang mereka terima dalam pra-pembangunan Tol Getaci?
3. Bagaimana bentuk kompensasi yang diterima oleh masyarakat Kampung Pangadungan RW 005 pada tahap pra-pembangunan Tol Getaci?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan tujuan penelitian menjadi berikut:

1. Untuk menganalisis penyampaian informasi mengenai kompensasi pra-pembangunan Tol Getaci yang dilakukan di Kampung Pangadungan RW 005.
2. Untuk menganalisis keterlibatan masyarakat Kampung Pangadungan RW 005 dalam pengambilan keputusan terkait kompensasi.
3. Untuk menganalisis bentuk kompensasi yang diterima oleh masyarakat Kampung Pangadungan RW 005 pada tahap pra-pembangunan Tol Getaci.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini juga memiliki beberapa kegunaan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun signifikansi sosial. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah (Signifikansi Akademik)
 - a. Penelitian ini dapat berkontribusi pada perkembangan teori dalam bidang sosiologi pembangunan dengan mengintegrasikan teori Keadilan John Rawls dengan fenomena pelaksanaan kompensasi pembangunan Tol Getaci di Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung dengan studi kasus di Kampung Pangadungan RW 005.
 - b. Penelitian ini juga berkontribusi untuk mengisi gap penelitian terkait pelaksanaan kompensasi dalam pembangunan infrastruktur berskala besar. Sehingga kajian di dalam penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi yang akan mengkaji isu yang serupa.
 - c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan teoritis bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengevaluasi pelaksanaan kompensasi pasca pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat yang terdampak. Evaluasi penelitian ini dapat diterapkan diberbagai konteks pembangunan baik di pedesaan atau perkotaan.

2. Kegunaan Sosial (Signifikansi Sosial)

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan praktis bagi pemerintah dan pelaksana proyek untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang terdampak akibat pembangunan infrastruktur khususnya dalam pelaksanaan kompensasi proses pra-pembangunan. Dengan panduan penelitian ini, maka para pemangku kepentingan dapat memastikan bahwa sebelum pembangunan dimulai tetap harus memperhatikan kualitas hidup masyarakat yang terdampak.
- b. Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pembangunan infrastruktur yang lebih humanis dengan menjadikan kebutuhan masyarakat terdampak sebagai prioritas utama. Dengan fokus pada keadilan distribusi manfaat penelitian ini dapat mendorong pihak yang bersangkutan dalam pembangunan untuk mempertimbangkan setiap dampak yang dapat ditimbulkan akibat pembangunan.
- c. Penelitian ini juga dapat menjadi penguat kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang hasilnya dapat berpengaruh besar bagi kehidupan mereka, sehingga keputusan dapat dilaksanakan secara transparansi dan berkeadilan.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dirancang untuk menggambarkan pelaksanaan kompensasi pra-pembangunan jalan Tol Getaci di Desa Ciluluk dengan menghubungkan antara rencana pembangunan Tol Getaci, masyarakat Kampung Pangadungan RW 005, teori Keadilan John Rawls, serta elemen-elemen penting lainnya dalam tahap pelaksanaan kompensasi pra-pembangunan termasuk penyebaran informasi, keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan, dan kompensasi yang diterima oleh masyarakat. Ketiga aspek ini dianalisis untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kompensasi ini dilaksanakan secara adil.

Pembangunan Jalan Tol Getaci (Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap) merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas wilayah di Pulau Jawa khususnya pada Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah (C, 2023). Meskipun proyek ini dirancang untuk memberikan manfaat dalam jangka panjang, proses pembangunan tidak dapat dipisahkan dari berbagai dampak sosial, terutama dalam tahap pra-pembangunan. Salah satu dampak paling signifikan adalah proses pengadaan tanah, yang mengharuskan masyarakat melepaskan hak atas lahannya dan sebagai gantinya menerima kompensasi, baik dalam bentuk uang ganti rugi (UGR) maupun bentuk lainnya yang dianggap layak, sehingga disini masyarakat menjadi subjek yang harus mendapatkan perhatian khusus (Rismayanti, 2018).

Desa Ciluluk, terutama Kampung Pangadungan RW 005 merupakan salah satu dari enam wilayah di Kecamatan Cikancung yang terdampak langsung oleh proyek pembangunan jalan Tol Getaci, oleh karena itu kampung di desa ini akan menjadi subjek penelitian termasuk masyarakat dan pihak-pihak terlibat dalam pembangunan Tol Getaci, sehingga penelitian ini tidak hanya akan membahas terkait satu persektif saja (Infofootomotif, 2023).

Dalam penelitian ini, konteks proyek pembangunan tidak hanya membawa perubahan fisik tetapi juga memicu perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat (Gultom & Tini, 2020). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pelaksanaan kompensasi dalam pembangunan ini dapat dirasakan secara merata, terutama bagi masyarakat Desa Ciluluk yang terdampak langsung.

Secara ideal, proyek pembangunan infrastruktur berskala besar seperti Tol Getaci seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat secara merata, khususnya bagi kelompok yang terdampak langsung oleh pembangunan, baik itu secara fisik maupun sosial ekonominya (Urrahmi & Putri, 2020). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik tetapi juga pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat terdampak.

Dengan memahami tentang karakteristik, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat peneliti dapat menjadikan hal tersebut sebagai dasar dalam merancang konsep

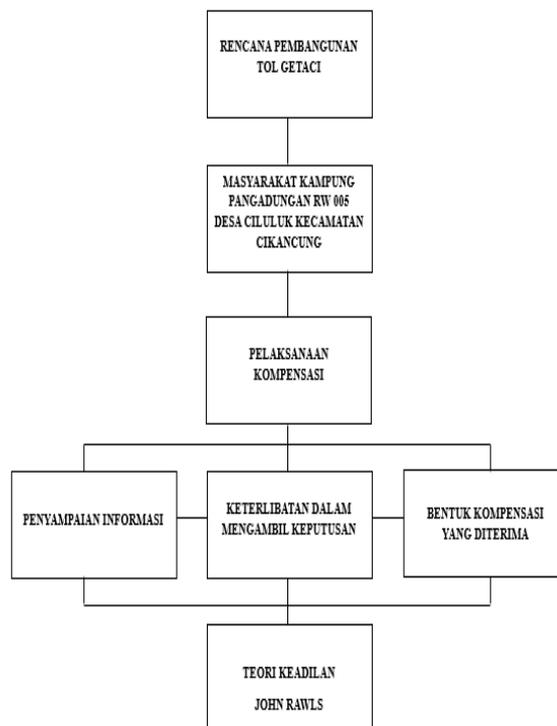
distribusi manfaat yang berprinsip keadilan (Rodhiyah, 2021). Oleh karena itu penelitian ini mengkaji aspek-aspek dalam pelaksanaan kompensasi yang meliputi tiga elemen utama berikut:

1. **Penyebaran Informasi:** Tahap ini menyoroti sejauh mana masyarakat Desa Ciluluk mendapatkan informasi tentang pembangunan Tol Getaci sebelum dimulainya pembangunan. Informasi ini seharusnya mencakup tujuan proyek, dampak pembangunan, hak-hak masyarakat, serta mekanisme dan nilai kompensasi. Jika adanya ketidakmerataan informasi, akan berpotensi memunculkan keresahan, kebingungan dan ketidakadilan (Kusriyah & Witasari, 2024).
2. **Keterlibatan Masyarakat:** Mengkaji sejauh mana masyarakat diberi ruang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui musyawarah, konsultasi, atau bentuk partisipasi lainnya. Tingkat keterlibatan masyarakat yang rendah dapat menunjukkan adanya dominasi pengambil kebijakan dan marginalisasi masyarakat terdampak (Riyanto et al., 2022)
3. **Kompensasi yang Diterima:** Menganalisis bentuk kompensasi yang diberikan kepada masyarakat, mencakup nilai, waktu pencairan, transparansi perhitungan, serta kesesuaian antara kompensasi dan dampak yang dialami masyarakat. Keadilan kompensasi dinilai dari sejauh mana hak masyarakat diakui dan dipenuhi secara adil (Puspita & Atmaja, 2020)

Kerangka berpikir ini menegaskan bahwa pembangunan yang adil dan berkelanjutan itu memerlukan sinergi antara praktik dengan teori. Untuk menilai ketiga aspek tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori Keadilan dari John Rawls. Teori ini menekankan pentingnya perlakuan yang setara bagi setiap individu, serta keharusan bahwa kebijakan yang diambil harus berpihak pada kelompok yang paling rentan (Alwino, 2016). Dalam konteks ini, masyarakat terdampak khususnya kelompok yang terdampak langsung secara fisik oleh pembangunan, merupakan pihak yang harus diutamakan dalam proses kompensasi.

Selain itu, kerangka berpikir ini juga menegaskan bahwa keadilan dalam pembangunan tidak hanya ditentukan oleh tujuan proyek, tetapi juga oleh proses yang menyertainya. Jika pelaksanaan kompensasi tidak menjamin informasi yang merata, keterlibatan yang bermakna, dan kompensasi tidak layak, maka keadilan sosial dalam pembangunan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pelaksanaan kompensasi pra-pembangunan Tol Getaci sebagai cerminan dari prinsip keadilan sosial yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap kebijakan pembangunan.

Sebagai ilustrasi hubungan antara rencana pembangunan tol getaci, yang melibatkan masyarakat Kampung Pangadungan RW 005, dan dalam rencana pembangunan, masyarakat merasakan pelaksanaan kompensasi, yang mana terdapat tiga hal yang diterima adalah penyampaian informasi, keterlibatan dalam mengambil keputusan dan bentuk kompensasi yang diterima, dengan menggunakan prinsip keadilan Rawls sebagai pisau analisis yang akan digambarkan dalam bentuk bagan kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skema Kerangka Berpikir

Sumber: Olahan Peneliti (2024)